

TUGAS AKHIR
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN TANPA IZIN DIKOTA KUTAI KARTANEGARA
(STUDI KASUS POLRES KUTAI KARTANEGARA)

Oleh:

AKBAR MAULANA YASNI
202010110311137



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBAHAN TANPA IZIN DIKOTA KUTAI KARTANEGARA
(STUDI KASUS POLRES KUTAI KARTANEGARA)**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi
salah satu syarat memperoleh
gelar kesajaraan dalam bidang Ilmu Hukum*



LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN
TANPA IZIN DI KOTA KUTAI KARTANEGARA (STUDI KASUS POLRES
KUTAI KARTANEGARA)**

Diajukan Oleh:


AKBAR MAULANA YASNI

202010110311137


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Rendamping,

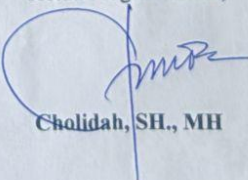

Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



Prof. Dr. Longga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AKBAR MAULANA YASNI

202010110311137

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

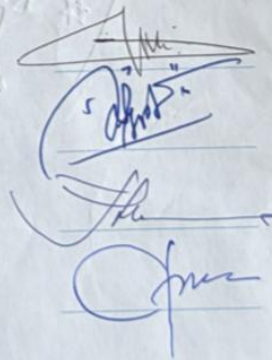
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH

Penguji II : Cholidah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AKBAR MAULANA YASNI

NIM : 202010110311137

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KOTA KUTAI KARTANEGARA
(STUDI KASUS POLRES KUTAI KARTANEGARA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palang, 23 Juli 2025

Akbar Maulana Yasni
Akbar Maulana Yasni

Ungkapan pribadi dan Motto

Ungkapan Pribadi:

"Langkah kecil yang terus dijalani akan lebih bermakna daripada rencana besar yang hanya disimpan dalam angan."



Motto :

"Untuk Sebuah Perubahan Memang Harus Ada Pengorbanan Tanpa Pengorbanan Gak Bakal Ada Berubah."

"Windah Basudara"

ABSTRAK

Nama : AKBAR MAULANA YASNI

NIM : 202010110311137

**Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KOTA KUTAI
KARTANEGARA (STUDI KASUS POLRES KUTAI
KARTANEGARA)**

Pembimbing : 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

Aktivitas pertambangan tanpa izin (illegal mining) di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Kutai Kartanegara dalam menindak aktivitas tambang ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Sosiologis, melalui wawancara dan studi dokumentasi di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan aparat kepolisian telah melakukan penindakan, efektivitas penegakan hukum belum optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, budaya lokal dan faktor ekonomi juga memengaruhi tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pertambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menekan angka pelanggaran tambang ilegal serta mendorong tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Tanpa Izin, Kutai Kartanegara.

ABSTRACT

Nama : AKBAR MAULANA YASNI

NIM : 202010110311137

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KOTA KUTAI

KARTANEGARA (STUDI KASUS POLRES KUTAI

KARTANEGARA)

MENTOR : 1. Nu'man Aunuh,S.H., M.Hum

2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

Illegal mining activities in Kutai Kartanegara Regency have continued to increase annually, despite the existence of clear legal frameworks such as Law Number 3 of 2020, which amends Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This research aims to examine the effectiveness of law enforcement against illegal mining practices, identify influencing factors, and analyze the efforts undertaken by the Kutai Kartanegara Police Department in handling such activities. This research uses a sociological juridical method, utilizing interviews and document studies within the jurisdiction of the Kutai Kartanegara Police. The findings indicate that although regulations are in place and law enforcement actions have been taken, the overall effectiveness remains suboptimal. Key challenges include limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and low public legal awareness. Moreover, local cultural values and economic dependency also influence the community's participation in illegal mining. Therefore, strong collaboration among the government, law enforcement agencies, and the public is essential to suppress illegal mining practices and promote sustainable and equitable resource governance.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Mining, Kutai Kartanegara.

KATA PENGANTAR

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas ridhanya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMANGAN TANPA IZIN DIKOTA KUTAI KARTANEGARA (STUDI KASUS POLRES KUTAI KARTANEGARA)**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terdapat kekurangan yang dilalaikan oleh penulis, baik dari segi bahasa, materi penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala jenis saran dan kritik akan penulis terima dengan lapang hati.

Tidak dapat disangkal bahwa perlu usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta dan terkasih di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Kepada Allah SWT, atas karunia-Nya yang berupa rezeki maupun ujian atau cobaan agar penulis sebagai hamba-Nya yang masih jauh dari kesempurnaan-Nya ini terus berusaha, belajar, dan memohon pertolongan-Nya.
2. Kepada orang tua yakni Alm. Ayahnda Yasni, Ibunda Erni Kusumawati Tan

,dan Alm. Nenek tercinta Komsiah, terima kasih atas usaha, tetesan keringat dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis, terimakasih karena selalu mengajarkan arti kata bersyukur atas segala hal yang sudah tuhan berikan. Skripsi ini ditulis penuh dengan penuh rintangan dan penuh keterbatasan., tetapi hal tersebut yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ibu penulis, terima kasih atas kerja keras dan usaha yang diberikan untuk penulis sehingga sampai tahap ini. Kepada orang terpesial penulis yang selalu menjaga penulis dari atas langit yang indah. Alm. Ayah dan Alm. Nenek penulis. Terima kasih karena selalu menjaga dan mendukung penulis dari atas sana, terimakasih yang tak terhingga karena selalu menjadi alas an penulis untuk kuat dalam menyelesaikan skripsi ini dalam menyelesaikan Studi Sarjana Hukum. Terakhir, terima kasih yang begitu besar dari anakmu.

3. Kepada kakak perempuan satu-satunya, Putri Putu Isnawati, penulis menyampaikan terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian. Di tengah kehilangan sosok Ayah, kakak dengan penuh tanggung jawab dan ketegaran mengambil peran tersebut tanpa pernah mengeluh. Dukungan moral, semangat, serta pengorbanan kakak telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada kakak tidak lupa saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Kakak Hamka dan Kakak Eriska atas segala bentuk dukungan, semangat, serta bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan waktu yang telah disisihkan sangat berarti bagi

penulis, baik secara akademis maupun emosional. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan skripsi ini.

5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Ayu Putri Malika, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis, telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
6. Kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMALANG.
7. Kepada Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMALANG.
8. Kepada Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
9. Kepada Said Noor Prasetyo S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
10. Kepada segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
11. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini

Malang, 2 juli 2025
Penulis

AKBAR MAULANA YASNI



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
Ungkapan pribadi dan Motto.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	14
PENDAHULUAN.....	14
A.LATAR BELAKANG.....	14
B.RUMUSAN MASALAH.....	24
C.TUJUAN PENELITIAN.....	24
D,MANFAAT PENELITIAN.....	24
E.KEGUNAAN PENELITIAN.....	25
F.METODE PENELITIAN.....	25
G.SISTEMATIK PENULISAN.....	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	29
A.Tinjauan Umum Penegakam Hukum.....	29
B.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	36
C.Tinjauan Umum Tindak Pidana Pertambangan.....	40
D.Tinjauan Umum Upaya Penaggulangan Tindak Pidana.....	44
BAB III.....	50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A.Efektivitas Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kutai Karatanegara.....	50
B.Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perizinan tambang tanpa izin ..	59
C.Upaya Kepolisian Kutai Kartanegara dalam menindak tambang illegal.....	64
BAB IV.....	69
KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
Kesimpulan.....	69
Saran.....	70
Lampiran Surat Tugas.....	78
Lampiran Kartu Kendali.....	79
Lampiran Surat Bebas Plagiasi.....	80
Lampiran Bukti Penelitian.....	81
Lampiran Dokumentasi.....	82

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hermansyah, 'Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2013), pp. 181–99 <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6167>>
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Uns*, 1.2 (2022), pp. 49–58
- ARANI, SYAIFUL AKBAR, 'Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area', 44.2 (2006), pp. 8–10
- Asiva Noor Rachmayani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Sleman)', 2015, p. 6
- ATAS, PERUBAHAN, PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SISTEM, and DENGAN, 'PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUB', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405
- Badaru, Baharuddin, Askari Razak, Wildan Syauqil Umam, and A. Darmawansya TL, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 1427–48, doi:10.37680/almanhaj.v5i2.3654
- Budiaris, Aldi, 'Dugaan Bisnis Ilegal Triliunan Di Balik Warga Diserang Preman', 3 April 2023, 2023 <<https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/dugaan-bisnis-ilegal-triliunan-di-balik-warga-diserang-preman?>>
- Cipta, Rineka, 'Hak-Hak Ini Bukan Hanya Diperuntukan Bagi Orang Dewasa, Tapi Juga Bagi Setiap Anak Tanpa Memandang Umur, Gender, Status Sosial, Agama, Dan Lain Sebagainya. Hak Asasi Manusia ('), 1945, pp. 1–28
- DEBBY, DEBBY, 'Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi', *Tindak Pidana*, 2018, p. 48 <<https://e-journal.uajy.ac.id/16530/1/HK114660.pdf>>
- Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), p. 4
- Fahrurrozi, Fahrurrozi, and Yusuf Muhamad Said, 'Penerapan Kewenangan POLRI Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Penambangan Batu Bara Illegal', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6.3 (2022), pp. 9860–72, doi:10.36312/jisip.v6i3.3280

- Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, and Sarah D. L. Roeroe, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia', *Lex Privatum*, 10.3 (2022), p. 2 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>>
- Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 4.1 (2022), pp. 261–75 <<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>>
- Hidayat, 'Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal', *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, 2011, pp. 19–32
- Ii, B A B, A Pengertian Tindak, Pidana Dan, and Unsur-unsur Tindak Pidana, 'Stratbaar Feit', pp. 19–47
- Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, and Ety Sandora, 'Tambang Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara', *Collegium Studiosum Journal*, 3.2 (2020), pp. 95–100, doi:10.56301/csj.v3i2.476
- Kementerian Hukum dan HAM RI, 'Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia', *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002, pp. 10–29 <<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>>
- Kristanto, Kiki, Alfred Yetno, King On, Putra Jaya, Eko Basuki Trimortiono, Affan Efendi, and others, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan', *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2023), pp. 1–25
- Lavianchandra, Jorico, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi, 'Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3.2 (2020), pp. 350–59, doi:10.34007/jehss.v3i2.258
- Lutfulloh, Zen, and Wahyu Donri, 'Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangehe', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47.2 (2021), pp. 175–94, doi:10.33701/jipwp.v47i2.2031
- Mawaddah, Fadila Hilma, 'Tertentu, Maka Tudak Mungkin Penegakan Hukum Akan Berlangsung Dengan Lancer. d) Kesadaran Hukum Masyarakat, Syarat Kesadaran Hukum Masyarakat.', 2017.April 2024, pp. 23–26
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, and Fajar Ari Sudewo, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal Di Kota Cirebon', *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), pp. 108–24,

doi:10.24905/diktum.v8i1.81

- Mutia, Anya Febby, 'TINDAK . PIDANA USAHA BATUAN TANPA . IZIN USAHA . PERTAMBANGAN (Suatu Penelitian Di Wilayah . Hukum Pengadilan . Negeri Jantho) CRIMINAL ACTION OF ROCK BUSSINESS WITHOUT A MINNING PERMIT (IUP) (A Study Jurisdiction Of The District Court Jantho) PEND', 7.26 (2023), pp. 1–15
- Mutiara Lestari Rismaya, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan', 8.3 (2023), pp. 1978–91
- Nadya, Shafira, Rahmayani Sembiring, Elis Rusmiati, and Imamulhadi, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan', *Kertha Semaya*, 8.4 (2020), pp. 541–70
- Nicodemu Wisnu, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)', *Recidive*, 8.1 (2019), p. 13
- Nicodemus Wisnu Pratama, Ismunarno, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)', *Society*, 3.2 (2009), p. 464
- Pandit, I G S, 'Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya', ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 0864, 2019
<<http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/367>>
- Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad Ahmad, 'Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal', *Batulis Civil Law Review*, 3.2 (2022), p. 177, doi:10.47268/ballrev.v3i2.966
- Pratiwi, Anggraeni Hadi, Zainal Abidin, Dwi Nirnia Ari Cahyani, Afriandi Setiawan, M. Thoriqul Islam, Angga Ravioka Farhansyah, and others, 'Pemberdayaan Dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa', *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3.2 (2023), pp. 601–8, doi:10.33379/icom.v3i2.2365
- Prof.Dr.Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
- Rahma, Nanda Desi, Yabsutur Rizka, Wardahtun Nufus, Nandita Ardrafitri Saraswati, and Sisca Chairani, 'Dampak Pertambangan Batu Bara Pada Kesehatan Lingkungan: A Systematic Review', *Health Safety Environment Journal*, 2.2 (2022), pp. 1–19

- Ramandana, Kanda, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel', *Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1.01 (2024), pp. 63–71
- Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, 'Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin', *Marwah Hukum*, 1.1 (2023), p. 29, doi:10.32502/mh.v1i1.5600
- Reno Fitriyanti, 'Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi', *Jurnal Redoks*, 1 (2016), pp. 34–40
- Rifqi, Miftahur, 'Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat', *Legitimasi*, VI.1 (2017), pp. 37–63
- Riyanti, Nova, Muhammad Riban Satia, and Muh Azhari, 'Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sumber Pendapatan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Sempadan Sungai Rungan Kota Palangka Raya', *Pencerah Publik*, 7.2 (2020), pp. 11–24, doi:10.33084/pencerah.v7i2.1797
- Rosia, Rina, Amalia Amalia, Atik Syarifah, Laili Rahmawati, Nur Syariah, and Zakiiyyatul Miskiyah, 'PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENCIPTAKAN HUMAN WELFARE (Perspektif Ekonomi Islam)', *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2021), pp. 12–26, doi:10.59755/alhisab.v1i2.68
- Salsabila, Ivanka, and Aullia Vivi Yulianingrum, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana “Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan”', *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2023), pp. 1–11, doi:10.33319/yume.v9i1.214
- Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Yusuf DM, MohdMilthree Saragih, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.2 (2023), pp. 1933–37
- Santoso, Imam Budi, and Taun Taun, 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup', *University Of Bengkulu Law Journal*, 3.1 (2019), pp. 15–22, doi:10.33369/ubelaj.v3i1.4795
- Sibatuara, Enjelina, and Vera W S Soemarwi, 'Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara Di Indonesia', *Jurnal Serina Penelitian*, 1.1 (2023), pp. 315–20 <<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24564>>
- Soekanto, S. (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Rajawali pres., 1983)
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”*, 2019, VOL. 1,
- Sumanggi, Darmin, 'Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region , East Kalimantan', *Humaniorum*, 01.01 (2023), pp. 29–35
- Tarigan, Pitiadani Br, 'Bab Ii Pembahasan Umum', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), pp. 37–98

- Undang-Undang No 3 Tahun 2020, ‘Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara’, *Pemerintah Pusat*, 2.4 (2020), p. 255
- Veronica, Ayu, and Kabib Nawawi, ‘PAMPAS : Journal Of Criminal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster’, *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, 1.3 (2020), pp. 45–57
- Wahyuni, Dr.Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017
- Wira Yudistiya, Aldin, ‘Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)’, 2021, p. 1 <[http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB II.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB%20II.pdf)>



Lampiran Surat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Akbar Maulana Yasni

Nim : 202010110311137

Dengan Judul Skripsi :

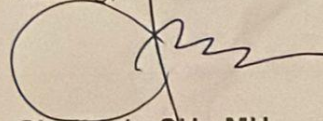
" PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN TANPA IZIN DIKOTA KUTAI KARTANEGARA
(STUDI KASUS POLRES KUTAI KARTANEGARA)
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

Malang, 17 Juni 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum